

EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRIALISASI GLOBAL

ELY STEVEN INGRATUBUN¹
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI UMEL TUAL
WIHALMINUS SOMBOLAYUK²
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

ABSTRACT

The dynamics of globalization and liberalization of the world economy are moving so fast, encouraging increased openness of economic relations between nations. Through various trade agreements, such as APEC, AFTA and CAFTA, competition is increasing. According to the World Economic Forum on global competitiveness, Indonesia was ranked 69th (among 177 countries studied) in 2004 and fell to 74th in 2005 .. The development of industrialization in the global economy is a step strategy in response to economical globalization. The involvement of Indonesia in the global economic cooperation has increased its national commitment, both in undergoing economic liberalization and in developing its national economic competitiveness. This research illustrates Indonesia's political challenges in responding to the dynamic changes of the global economy. So this research is in the form of a literature review of the literature on political economy about the development of global industries as one of the central economies of a country, especially Indonesia in order to stabilize future economic fundamentals. This study aims to find out and explore the role of political economy in the development of global industries in each country, both developing and developed countries and this research to determine the extent to which the role of global industrialization affects the economy of a country in the future.

Keywords: *Political Economy, Global Industrialization, Indonesian Industry.*

ABSTRAK

Dinamika globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia bergerak begitu cepat, mendorong peningkatan keterbukaan hubungan ekonomi antar-bangsa. Melalui berbagai kesepakatan perdagangan, seperti APEC, AFTA dan CAFTA, maka persaingan semakin meningkat. Menurut Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) tentang daya saing global, Indonesia berada pada posisi ke-69 (di antara 177 negara yang diteliti) pada tahun 2004 dan turun menjadi peringkat ke-74 pada tahun 2005.. Perkembangan industrialisasi ekonomi global merupakan langkah strategi dalam menanggapi globalisasi yang ekonomis. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi global tersebut telah meningkatkan komitmen nasionalnya, baik dalam menjalani liberalisasi ekonomi maupun dalam membangun daya saing ekonomi nasionalnya. Penelitian ini menggambarkan tantangan politik Indonesia dalam menanggapi perubahan dinamis dari ekonomi global tersebut. Jadi penelitian ini dalam bentuk kajian literature pustaka tentang ekonomi politik tentang pembangunan industri global sebagai salah satu sentral perekonomian suatu Negara, khusus Indonesia guna menstabilkan fundamental ekonomi kedepan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami peran ekonomi politik dalam pembangunan industri global pada masing-masing Negara, baik negara berkembang maupun negara maju dan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peranan industrialisasi global berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara kedepan.

Kata-kata Kunci: Ekonomi politik, industrialisasi global, industri Indonesia.

¹elysteveningratubun@gmail.com

²wihalminusombolayuk@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan liberalisasi ekonomiduniabergeser begitu cepat mendorong semakin meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar-bangsa dan mendorong persaingan yang semakin meningkat. Menurut Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) tentang daya saing global, Indonesia berada pada posisi ke-69 (di antara 177 negara yang diteliti) pada tahun 2004 dan turun menjadi peringkat ke-74 pada tahun 2005. Namun, secara mengejutkan pada tahun 2011 peringkat tersebut meningkat menjadi ke-44 di antara 139 negara yang diteliti. Lonjakan peringkat daya saing tersebut adalah yang tertinggi sejak tahun 2005. Dalam era global, faktor kreativitas, inovasi dan teknologi memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Dalam era global, konektivitas perdagangan, konsumsi, dan informasi terjadi melalui teknologi informasi dan dunia maya. Interaksi antara kreativitas, inovasi, dan teknologi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kesempatan kerja.

Salah satu fenomena menarik yang menyertai perubahan ekonomi-politik global sejak berakhirnya Perang Dingin adalah berkembangnya regionalisme ekonomi yang ditempuh melalui pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional serta pelembagaan Free Trade Area (FTA) atau Regional Trade Agreement (RTA). Berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu yaitu antara lain: EFTA (European Free Trade Area), NAFTA (North American Free Trade Area), serta APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Indonesia bersama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN secara kolektif menjadi keanggotaan APEC, forum kerjasama ekonomi regional yang dibentuk pada 1989. ASEAN sebagai institusi regional yang dibentuk pada 1967 telah memainkan peran yang semakin penting seiring dengan perubahan ekonomi-politik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN telah menjadi pendorong utama (driving force) pembentukan berbagai forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, seperti: ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea Selatan dan ASEAN-Australia dan Selandia Baru. Bahkan, ASEAN berperan aktif dalam pembentukan RCEP (Regional Cooperation Economic Partnership), suatu forum kerjasama ekonomi regional terbesar.

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing).

Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di

suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beraneka ragam jenis industrinya.

Tujuan negara tersebut, pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kegiatan, termasuk salah satu diantaranya adalah mendorong laju perekonomian nasional. Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan di era ekonomi global.

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang cukup berat, perekonomian Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun demikian perekonomian beberapa Negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan/penghentian pembelian obligasi (*tapering off*) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2014 perekonomian global hanya tumbuh 3,4 persen, namun dengan didorong oleh makin baiknya perekonomian AS, negara maju lainnya, dan *emerging market*, maka tahun 2015 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus membaik, dan tumbuh sebesar 3,5 persen.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persendi tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah.

Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk – produk industrialisasi selalu memiliki “dasar tukar” (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai

tambah yang lebih besar dibandingkan produk – produk sector lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya serta memberikan marjin/keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu industrialisasi dianggap sebagai ‘obat mujarab’ (*panacea*) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 yang menyatakan bahwa, Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997.

Sedikit sekali negara – negara berkembang yang menyadari bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan sektor – sektor lain, terutama sektor pertanian. Kedua sektor tersebut sangat erat. Sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri baik sebagai penyedia masukan maupun sebagai pasar bagi produk – produk industri.

Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan rangsangan bagi pembangunan sector industri pula. Jadi, kelancaran program industrialisasi tergantung pula pada perbaikan di sector-sector lain dan seberapa jauh perbaikan yang dilakukan mampu mengarahkan dan bertindak sebagai pendorong kemunculan industri – industri baru.

Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industry terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 25% (Pasaribu, 2010).

2. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ekonomi Politik

Politik dan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan meskipun tujuannya berbeda, yaitu ekonomi tujuannya kesejahteraan dan politik tujuannya keadilan, makanya ada ilmu politik ekonomi dan keduanya saling berkaitan. Secara teori ekonomi naik turunnya harga diakibatkan pergeseran kurva *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) artinya, jika permintaan barang banyak dan pasokan barang sedikit, maka akan terjadi kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika pasokan banyak permintaan sedikit, maka harga turun dan tugas negara adalah menjaga stabilitas harga agar tetap stabil dengan menjamin pasokan barang dipasar. Jika pasokan barang sudah stabil tapi harga tetap tidak stabil berarti ada permainan atau kecurangan di pasar yang dilakukan pemilik modal besar agar mendapatkan keuntungan lebih dan itu bisa terjadi di pasar barang, modal, dan uang.

Dalam hal dolar lebih disebabkan politik pemegang kapital agar kebijakan moneter yang memicu suku bunga jadi naik. Kekuatan mata uang ditentukan oleh perekonomian suatu negara terutama produksi dan ekspor sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Kholdun yaitu kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyak uangnya di negara tersebut tetapi ditentukan oleh produksi di negara tersebut dan kemampuan untuk memperoleh neraca perdagangan positif dan menurut Ibnu Kholdun bahwa nilai uang suatu negara merefleksikan kemampuan produksi negara tersebut dan nilai uang antarnegara tergantung

pada kemampuan memperoleh neraca perdagangan positif dan saat ini hampir semua negara berkembang lebih banyak sebagai konsumen bukan produsen. Dolar sebagai tolok ukur perekonomian karena hampir semua transaksi di dunia menggunakan standar dolar dan jika negara lain tidak menggunakan dolar, maka negara itu tidak diberi hutang bahkan akan dikucilkan di dunia internasional sebagaimana negara-negara yang sudah banyak terzalimi kemudian diperangi bahkan pemimpin dan negaranya dihancurkan dan semua itu adalah kebijakan politik yang dimulai oleh Richard Nixon presiden Amerika yang saat itu mengumumkan secara resmi penghentian sistem Bretton Woods yaitu pada 15 Agustus 1971 dan sejak itu hingga sekarang sistem uang emas tidak lagi menjadi sistem moneter internasional dan dengan sistem itu dengan mudah Amerika dan negara-negara lain mencetak uang tanpa perlu lagi dijamin dengan komoditas yang bernilai (*fiat money*) dan secara politik pula yaitu ketika negara Islam di Turki hancur pada tahun 1924 yang disebut dengan dinasti Turki Usmani, maka berakhir pula penggunaan dinar dan dirham Islam dikalangan kaum muslimin. Negara Amerika terpuruk, resesi dan lain-lain tapi karena banyak negara bergantung pada dolar, maka Amerika masih bisa untung dengan cara menjual dolar yang biaya cetaknya sangat murah dan Amerika dapat untung yang besar yaitu dari selisih biaya cetak dan nilainya.

Menurut ramalan Schumpeter yang menyimpulkan gerakan yang sia-sia ini seraya berkata “kapitalisme menciptakan suatu kerangka pikir rasional, setelah menghancurkan otoritas moral begitu banyak institusi, yang pada gilirannya akan melawan miliknya sendiri” (The Future of Economics: An Islam Perspective, 2000: XVI). Kemudian pernyataan Thomas Friedman “serangan terhadap mereka yang akan membangun dunia pada basis satu dimensi, di mana perdagangan adalah segala-galanya, di mana hanya ada perhitungan finansial saja yang perlu, dengan mudah akan menemui serangan moral potensial terhadap globalisasi.” Sangat disayangkan atas berantaknya teori ekonomi. Membangun struktur yang baru atau menggunakan sistem lama dengan memilah-milah yang mana yang seharusnya digunakan dan mana yang tidak. Robert Heilbroner pun mengatakan “apakah ekonom mulai menyadari bahwa mereka sebenarnya telah membangun suatu menara di atas fondasi yang sempit. Perdebatan atas teori-teori, asumsi bahkan paradigma yang mendasar dalam ekonomi tengah menghadapi tantangan. Perdebatan tersebut memunculkan wacana bahwa perlunya perubahan dalam paradigma yang salah ini. Menurut Amitai Etzioni adalah paradigma neoklasik yang bersifat individualistis, rasionalistis, dan utilitarian yang telah berakar yang tidak hanya diterapkan di dunia ekonomi, melainkan juga kepada hubungan sosial.

B. Pengertian Globalisasi

Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas, atau lebih dalam adalah bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebih familiar. Jika konsep globalisasi dihubungkan dengan investasi maka ini jelas sangat berdekatan. Sementara jika kita menarik catatan sejarah masa lalu maka globalisasi pada dasarnya sudah dimulai sejak beratus tahun yang lalu.

Kisah ini dimulai dari petualangan seorang lelaki yang ingin melakukan penjelajahan dunia, telah mengantarkan Christopher Columbus yang bernama asli Cristobal Colon untuk melakukan ekspedisi ke India pada tanggal 3 Agustus 1493 dengan bendera Santa Maria, dimana ia berangkat dari pelabuhan Polos, Spanyol dan kembali tanggal 15 Maret tahun 1494. Dapat juga kita kaji tentang kisah perjalanan Vasco da Gama pada tanggal 8 Juli 1497 dan kembali lagi di bulan September 1499 di Lisabon, Portugal. Perjalanan mereka

berdua ini boleh jadi sebagai babak awal pencatatan sejarah tentang dimulainya globalisasi dunia.

Mungkin sejarah telah mencatat bahwa perjalanan Vasco da Gama membuktikan bagaimana perjalanan saat mulai meninggalkan Tanjung Harapan, ekspedisi berlayar ke India dan sampai ke Kalikut dimana pada tempat tersebut, Vasco da Gama menemukan banyak sekali rempah-rempah yang sangat menguntungkan untuk dijual di pasar Eropa. Selanjutnya dimulailah pengangkutan rempah-rempah tersebut melalui pelabuhan Alexandria menuju Venezia.

Maka tidak heran jika kaum anti globalisasi mengatakan bahwa globalisasi merupakan kata lain dari penjajahan negara maju pada negara berkembang atau terbelakang dengan model dan wajah baru. Jika kita bandingkan dengan masa eksploitasi negara Asia Afrika oleh bangsa kulit putih (barat) pada era dibawah tahun 1940-an.

C. Globalisasi dan Posisi Indonesia

Saat ini bisa dikatakan seluruh negara di dunia ini telah mendengar dan merasakan dampak globalisasi. Salah satu yang mempercepat proses globalisasi tersebut adalah jaringan dan perkembangan media komunikasi yang digunakan saat ini. Integrasi, interkoneksi dan bahkan interdependensi (Keohane Dan Nye: 1977) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media dan teknologi komunikasi yang beroperasi lintas negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa tanpa adanya teknologi komunikasi, maka tidak ada pasar-pasar global sebagaimana adanya sekarang.

Disisi lain, bahwa konsep komunikasi telah berperan membentuk format model pembangunan ekonomi dan politik di suatu negara dan tidak terkecuali Indonesia yang dapat dikatakan sebagai negara yang sangat *open mind* dalam memahami globalisasi. Indonesia di mata internasional memiliki pengaruh besar, dan posisi Indonesia sejak jaman dulu hingga sekarang dianggap sebagai negara dengan potensi besar, baik dari segi sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika globalisasi telah menyeret Indonesia lebih dalam untuk terlibat disana, terutama dengan sikap Indonesia yang begitu terbuka terhadap produk asing dengan sikap Indonesia yang begitu terbuka terhadap produk asing dengan kata lain *big market for many product* (pasar besar untuk banyak produk).

Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan pada negara Indonesia, dimana setiap peluang dan tantangan tersebut telah masuk ke berbagai bidang, dimana semua itu harus dilihat dan disikapi secara penuh kedewasaan. Peluang dan tantangan yang dimaksud adalah Bidang Politik, Demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat, Politik luar negeri yang bebas aktif, Melakukan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip partisipasi, transparansi, *rule of law*, *responsive*, serta efektif dan efisien, Bidang Ekonomi dan kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga, Menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern (perbankan, pasar modal, dan lain-lain), Mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional, Bidang Sosial-Budaya Meningkatkan sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan komitmen melalui demokratisasi pendidikan, Penguasaan ilmu dan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa.

Setiap tantangan dan peluang tersebut disusun perencanaan yang bersifat mengapresiasi dan mengarah ke pembangunan bangsa. Amerika bisa dikatakan negara yang membentuk mempercepat terbentuknya proses globalisasi tersebut, dan semua ini dimulai konsepnya pasca Perang Dunia II. Saat ini memang amerika dianggap sebagai negara super power atau polisi dunia. Pengaruh politik dan ekonomi mereka di pentas dunia

telah diakui di berbagai pihak. Ini tercermin berbagai data ekspansi bisnis perusahaan yang berasal dari Amerika, bahkan produsen penjualan senjata di dunia juga dikuasai oleh perusahaan Amerika. Dalam konteks ini posisi Indonesia dianggap oleh pengamat politik dalam dan luar negeri telah ikut memainkan perannya. Indonesia termasuk negara yang sulit diintervensi, artinya independensi negara Indonesia dapat dianggap sangat independen.

D. Sejarah Industri di Indonesia

Pada sekitar tahun 1920-an industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil dan sebagainya, yang tidak terkoordinasi. Tenaga kerja terpusat di sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Perusahaan besar American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930-n telah meruntuhkan perekonomian.

Penerimaan ekspor turun dari 1.448 juta Gulden (tahun 1929) menjadi 505 juta Gulden (tahun 1935) sehingga mengakibatkan pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan pada sektor perkebunan ke sector industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian ijin dan fasilitas bagi pendirian industri baru.

Menurut sensus industri kolonial pertama (1939), industri-industri yang ada ketika itu telah memperkerjakan tenaga kerja sebanya 173 ribu orang yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan tekstil serta barang-barang logam, semuanya milik asing. Meskipun sumber dan struktur investasi pada masa itu tidak terkoordinasi dengan baik tetapi, menurut sebuah taksiran, stok investasi total di Indonesia pada tahun 1937 lebih kurang sebesar US\$ 2.264 juta, lebih dari separuhnya (US\$ 1.411 juta) dimiliki oleh sector swasta. Dari jumlah tersebut Belanda memegang andil terbesar dengan 63%, kemudian Inggris 14%, Cina 11%, dan Amerika Serikat 7%.

Pada masa Perang Dunia II kondisi industrialisasi cukup baik. Namun keadaanya terbalik semasa pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan adanya larangan impor bahan mentah, diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja (romusha) sehingga investasi asing pada masa itu praktis nihil. Limabelas tahun kemudian setelah merdeka, Indonesia menjadi pengimpor besar barang-barang kapital dan teknologi, serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing. Berkat kebijaksanaan itu, penanam modal asing mulai berdatangan meskipun masih dalam taraf coba-coba.

Sesudah tahun 1957 sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh sepanjang tahun 1960-an sektor industri praktis tidak berkembang. Selain akibat situasi politik yang selalu beergejoak juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga ahli serta terampil. Aliran modal yang masuk mayoritas dari negara sosialis dalam bentuk pinjaman (hampir setengahnya dari Rusia).

Pada masa itu perekonomian dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan menurunnya PDB, kecilnya peran sektor industri (hanya sekitar 10% dari PDB) dan tingginya angka pengangguran. Sektor industri didominasi oleh industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik super Fosfat di Cilacap.

Keadaan ini terwariskan kepada pemerintahan orba. Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Keadaan semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat makro dan dilaksanakannya kebijakan diberbagai bidang.

3. PEMBAHASAN

2.1. Forum Ekonomi Dunia dan Sejarah Berdirinya *World Economic Forum*(WEF).

Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/ WEF*) merupakan organisasi internasional independen , yang berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dunia, dengan mengajak kalangan pelaku usaha, akademis politisi, dan para pemimpin komunitas, untuk menyusun agenda global, regional, dan industri. Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*) bermula dari adanya pertemuan antara para pemimpin bisnis Eropa di Davos, Swiss, pada bulan Januari 1971, di bawah payung Komisi Eropa. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Klaus Schwab, seorang Guru Besar Kebijakan Bisnis Universitas Geneva Swiss. Schwab lalu mendirikan Forum Manajemen Eropa, dan mengundang para pelaku bisnis Eropa, untuk pertemuan tahunan di Davos, tiap bulan Januari. Pada Tahun 1974, masalah yang didiskusikan mulai meluas, dengan memasukkan masalah ekonomi dan sosial. Para pemimpin politik mulai diikutsertakan dalam pertemuan tahunan.

Dua tahun berselang, Forum Manajemen Eropa lalu membuka keanggotaan untuk 1.000 perusahaan papan atas dunia. Laporan persaingan global (*Global Competitiveness Report*) pada tahun 1979, menandai transformasi lembaga tersebut di bidang ilmu pengetahuan dan riset sosial ekonomi. Forum Manajemen Eropa lalu berubah menjadi Forum Ekonomi Dunia di tahun 1987, serta memperluas visinya dalam berbagai bidang, termasuk dalam mencari solusi bagi berbagai macam konflik internasional. Laporan Persaingan Global diterbitkan tiap tahunnya, diikuti oleh sejumlah riset lain, misalnya Laporan Kesenjangan Jender Global (*Global Gender Gap Report*) dan Laporan Risiko Global (*Global Risk Report*). Anggota Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/ WEF*) adalah perusahaan global dengan nilai usaha 5 Miliar Dollar AS, walau nilainya cukup bervariasi untuk berbagai sector industry dan wilayah. Seribu anggota Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/ WEF*), menjadi jantung aktivitas organisasi ini serta mendukung usaha WEF dalam memperbaiki kualitas dunia.

2.2. Forum Ekonomi Dunia: Kemiskinan Digital Perlambat Pertumbuhan Ekonomi

Forum Ekonomi Dunia mengeluarkan laporan Teknologi Informasi Global untuk tahun 2015. Laporan itu menyebutkan bahwa "keuntungan ekonomi dan sosial penuh dari internet hanya tersedia bagi minoritas populasi dunia." Laporan tersebut juga mengatakan bahwa banyak negara yang gagal menerapkan reformasi dasar yang bisa meningkatkan produktivitas dan ekonomi mereka.

Thierry Geiger, pakar ekonomi senior untuk Forum Ekonomi Dunia dan juga editor laporan tersebut mengatakan, "Kemiskinan digital adalah ketidakmampuan menggunakan IT, entah karena tidak ada akses atau karena tidak ada kecakapan digital. Ini bentuk kemiskinan yang sesungguhnya karena tanpa akses digital, tanpa kecakapan digital, kita tidak bisa memanfaatkan potensi besar teknologi untuk memperbaiki kehidupan kita dan menciptakan kesempatan."

Ia berpendapat bahwa, teknologi penting untuk pembangunan dan bukan sebuah kemewahan yang baru dipertimbangkan ketika masalah-masalah lain selesai. Pengantar laporan tersebut mengatakan, "Edisi Laporan Teknologi Informasi Global tahun 2015 dikeluarkan di saat banyak ekonomi di dunia bergulat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi merata dan bermanfaat bagi semua penduduk mereka. Ekonomi maju belum mencapai potensi mereka seutuhnya dan mereka dengan gigih mengatasi pengangguran, ketidakadilan yang semakin meningkat dan masalah-masalah fiskal. Pasar negara berkembang dan negara berkembang menghadapi masalah lebih besar dari sebelumnya

dan harus menyesuaikan model pembangunan mereka untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi keuntungan yang lebih luas."

Menurut Geiger, "Teknologi bisa sangat mempercepat pembangunan negara dengan ekonomi kecil dan ekonomi lebih besar. Dan kami yakin bahwa hal ini harus ditangani dengan serius. Semua orang percaya teknologi ada di mana-mana, tapi pada kenyataannya tidak dan banyak kesempatan besar yang terlewat akibat itu."

Laporan tersebut menempatkan Singapura di tempat teratas dari 143 negara yang "memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk dampak sosial dan ekonomi." Selain Singapura, 10 negara teratas lainnya adalah Finlandia, Swedia, Belanda, Swiss, AS, Inggris, Luksemburg dan Jepang. Negara terburuk untuk penggunaan ICT adalah Chad, Guinea, Burundi, Angola, Myanmar, Mauritania, Haiti, Yaman, Madagascar dan Timor Timur. Untuk pertama kali Forum Ekonomi Dunia, WEF, Asia Timur Asia dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Sekitar 500 pemimpin bisnis dan masyarakat diperkirakan hadir dalam WEF yang berlangsung di beberapa tempat pada tanggal 12 dan 13 Juni 2011.

Forum Ekonomi Dunia atau WEF adalah sebuah yayasan organisasi non-profit yang terdiri dari pelaku bisnis, cendekiawan politikus dan pemimpin masyarakat. Forum ini tidak hanya berkecimpung di bidang ekonomi, namun juga bergelut di masalah penting lainnya seperti lingkungan, kesehatan, dan pangan. WEF terkenal dengan pertemuan tahunan di Davos yang sudah menjadi agenda wajib untuk sebagian pemimpin dunia, baik itu pemimpin pemerintahan, bisnis, maupun lembaga swadaya masyarakat.

WEF berkomitmen untuk meningkatkan kondisi di dunia melalui proyek-proyek untuk isu-isu tertentu, seperti penanganan dan pencegahan HIV/AIDS, pengadaan air bersih, dan dialog antar Islam dan Barat. Pertemuan puncak WEF menjadi ajang dari para pemimpin pemerintahan dunia dan anggota WEF untuk memetakan solusi atas tantangan-tantangan global, seperti terorisme maupun perusahaan lintas negara. Dengan berkembangnya pandangan atas isu-isu yang penting, maka WEF memiliki posisi yang unik dalam memobilisasi orang dan sumber daya untuk memberikan tanggapan. Benih forum ini muncul di tahun 1971 ketika Professor Klaus Schwab dari Administrasi Bisnis, Universitas Jenewa, mengundang para pemimpin bisnis dunia Eropa di Davos untuk membicarakan upaya manajemen global. Keberhasilan pertemuan itu mendorong Profesor Schwab mendirikan Forum Managemen Eropa yang kemudian berganti nama menjadi Forum Ekonomi Dunia, WEF.

Anggota WEF mewakili 1.000 perusahaan besar dan 200 perusahaan kelas menengah yang kebanyakan berasal dari negara berkembang serta punya andil besar di kawasan. WEF juga mempunyai hubungan yang erat dengan cendekiawan, pemimpin agama, media dan LSM. WEF tidak memberikan fasilitas pinjaman atau bantuan keuangan kepada negara, seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Keuangan. Fungsi WEF lebih sebagai wadah atau menjadi fasilitator untuk anggotanya supaya dapat berjumpa dengan para pemimpin pemerintahan, bisnis, politik dan LSM.

Penelitian ekonomi WEF dilakukan oleh Pusat Daya Saing dan Performa Dunia, yang mengeluarkan Indeks Daya Saing Global setiap tahunnya. Indeks Daya Saing Global berusaha mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi negara-negara di dunia dalam memajukan perekonomian mereka. Posisi Indonesia di indeks Global Daya Saing tahun 2010 di peringkat 44.

Sepertinamanya, maka WEF Asia Timur lebih memberikan perhatian khusus kepada para tokoh dan pemimpin di negara-negara Asia timur. Tidak seperti organisasi induknya, Forum Ekonomi Dunia tidak mempunyai tempat tetap dalam melakukan pertemuan tahunannya. Tahun ini adalah yang ke 20 kalinya forum dilaksanakan dan untuk pertama

kalinya pertemuan dilakukan di Jakarta, Indonesia. Selain WEF Asia Timur, antara lain juga WEF Afrika dan WEF Amerika Latin.

Menurut Sushant Palakurthi Rao, Direktur Asia WEF, Indonesia dipilih karena merupakan salah satu perekonomian terbesar di kawasan ASEAN dan sekaligus pula tahun ini mengemban pucuk pimpinan ASEAN. Selain itu Indonesia juga tercatat sebagai negara yang mengalami kemajuan paling pesat di indeks daya saing diantara negara ekonomi terkuat G20 dalam lima tahun terakhir ini.

Ada empat tema besar yang diusung, penanganan gangguan global, lapangan kerja dan pertumbuhan yang inklusif, kepemimpinan yang berkesinambungan, serta eksplorasi norma baru di Asia.

2.3. Pengaruh Perkembangan Perindustrian Terhadap Perekonomian

Dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam GBHN 2000-2004, yaitu Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan lima strategi utama, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan ilmu Berdasarkan ketentuan pengetahuan tersebut di atas dan dapat teknologi. diketahui bahwa perkembangan industri sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Hal tersebut kembali dipertegas dalam konsiderans Undang-Undang Perindustrian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984) yang menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik pengertian bahwa perkembangan industri membawa pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya.

2.4. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perindustrian di Indonesia.

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan *emerging* yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara

pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 sampai dengan 6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Dari sisi *permintaan*, permintaan eksternal akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8 sampai dengan 5,2 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik.

Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan permintaan terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,6 sampai dengan 9,0 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor.

Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan berusaha. Selain itu, permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,0 sampai dengan 5,2 persen. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 2,0 sampai dengan 2,5 persen yang didukung oleh percepatan penyerapan anggaran pembangunan yang diikuti dengan akuntabilitas dan transparansi yang makin baik.

Dari sisi *penawaran*, pertumbuhan akan ditopang oleh pertumbuhan masing-masing industri sebagai berikut :

Pertama, Industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,2 sampai dengan 4,3 persen, yang antara lain didorong oleh : (i) meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung yang mencapai 75,3 ton dan 20,3 juta ton; (ii) meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet dengan perkiraan produksi mencapai 30,8 juta ton dan 3,4 juta ton; (iii) pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau serta unggas dengan perkiraan produksi sebesar 506,2 ribu ton dan 1,2 juta ton; serta (iv) kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan juga produk olahan perikanan.

Kedua, Industri pertambangan dan penggalian tumbuh 0,3 sampai dengan 0,4 persen yang didorong oleh naiknya permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor); dan implementasi kebijakan ekspor bahan mineral yang telah diolah.

Ketiga, Industri pengolahan tumbuh 5,9 sampai dengan 6,4 persen yang didorong oleh besarnya pasar domestik, tumbuhnya perusahaan bernilai tambah tinggi, dan meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur (energi, jalan, kawasan, dan pelabuhan).

Keempat, Industri listrik dan gas tumbuh 5,7 sampai dengan 5,9 persen yang didorong oleh: (i) meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang diperkirakan akan bertambah sekitar 4.213 MW (ii) meningkatnya tingkat rasio elektrifikasi menjadi sekitar 90,15 persen (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) maupun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Kelima, Industri pengadaan air tumbuh 5,8 sampai dengan 6,0 persen yang didorong oleh pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air untuk industri dan pembangkit energi; dan meningkatkan kapasitas prasarana air baku sebesar 9,33 m³/det serta fungsi dan layanan air baku sebesar 49 m³/det akan tetap dijaga.

Keenam, Industri konstruksi tumbuh 7,0 sampai dengan 7,3 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring

dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35 GW (ii) implementasi program pembangunan rumah, yang meliputi peningkatan kualitas rumah, fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (iii) pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan, pembangunan/peningkatan 98 ribu ha jaringan irigasi, termasuk diantaranya jaringan irigasi air tanah dan jaringan rawa, rehabilitasi 189 ribu ha jaringan irigasi, serta peningkatan jaringan tata air tambak seluas 5.575 ha dan rehabilitasi tata air tambak seluas 11 ribu ha.

Ketujuh, Industri perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,0 sampai dengan 6,3 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik aktivitas ekspor dan impor maupun aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, perdagangan besar dan eceran diperkirakan akan meningkat sebesar 5,4 sampai dengan 6,3 persen.

Kedelapan, Industri transportasi dan pergudangan tumbuh 8,1 sampai dengan 8,4 persen yang didorong oleh peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk lalu lintas darat, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Di samping itu tentunya perbaikan faktor logistik termasuk kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan (termasuk *dwelling time*) dan bandara di kota-kota besar tersebut yang ditingkatkan efisiensinya.

Kesembilan, Industri penyediaan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 6,1 sampai dengan 6,2 persen sejalan dengan membaiknya sector pariwisata; meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga meningkatkan jumlah wisatawan nusantara (Wisnus); dan berkembangnya destinasi pariwisata Indonesia.

Kesepuluh, Industri jasa keuangan tumbuh 7,5 sampai dengan 7,9 persen yang ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan dan pasar modal.

Kesebelas, Jasa perusahaan tumbuh 9,1 sampai dengan 9,2 persen yang didorong oleh peningkatan usaha jasa konsultan konstruksi/arsitektur (perumahan, gedung kantor, pertokoan dan apartemen). Sementara industri administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 2,6 persen sejalan dengan dengan telah optimalnya BPJS kesehatan, perluasan kepersertaan JKN, serta akan mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Keduabelas, Industri pendidikan tumbuh 8,5 sampai dengan 8,7 persen yang utamanya didorong oleh makin optimalnya implementasi Kartu Indonesia Pintar.

PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 (DALAM %)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
					APBNP	Perkiraan
Pertumbuhan Ekonomi*	6,2	6,0	5,6	5,0	5,7	5,8-6,2
<i>Pertumbuhan Sisi Pengeluaran*</i>						
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,5	5,4	5,1	5,1	5,0-5,2
Konsumsi LNPRT	5,5	6,7	8,2	12,4	3,5	4,0-6,0
Konsumsi Pemerintah	5,5	4,5	6,9	2,0	4,5	2,0-2,5
PMTB	8,9	9,1	5,3	4,1	8,5	8,6-9,0
Ekspor Barang dan Jasa	14,8	1,6	4,2	1,0	2,2	4,8-5,2
Impor Barang dan jasa	15,0	8,0	1,9	2,2	1,6	4,0-5,0
<i>Pertumbuhan Sisi Produksi*</i>						
Pertanian	4,0	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2-4,3
Pertambangan dan Penggalian	4,3	3,0	1,7	0,6	0,6	0,3-0,4
Industri Pengolahan	6,3	5,6	4,5	4,6	6,1	5,9-6,4
Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	10,1	5,2	5,6	5,7	5,7-5,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7	3,3	4,1	3,1	5,3	5,8-6,0
Konstruksi	9,0	6,6	6,1	7,0	7,0	7,0-7,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,7	5,4	4,7	4,8	4,9	5,0-6,3
Transportasi dan Pergudangan	8,3	7,1	8,4	8,0	8,1	8,1-8,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,9	6,6	6,8	5,9	6,0	6,1-6,2
Informasi dan Komunikasi	10,0	12,3	10,4	10,0	10,1	10,2-10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,0	9,5	9,1	4,9	6,4	7,5-7,9
Real Estat	7,7	7,4	6,5	5,0	6,5	6,8-7,0
Jasa Perusahaan	9,2	7,4	7,9	9,8	9,1	9,1-9,2

Sumber : Renja Pemerintah Tahun 2016 (Kerangka Ekonomi Makro)

Dalam rangka kebutuhan inilah sudah saatnya untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang Perindustrian yang berlaku, dimana Undang-Undang tersebut sudah sangat dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan perindustrian yang ada pada saat ini.

Masalah ini menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri selama ini dirasakan kurang mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur beberapa segi tertentu saja dalam tatanan dan kegiatan industri, dan selanjutnya seringkali di bidang tidak berkaitan birokrasi, satu optimalisasi dengan atas yang lain.

Pemberdayaan kementerian-kementerian yang terkait sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perkembangan perindustrian sebagaimana yang telah digariskan dalam cita-cita pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan SDM, pemangkasan birokrasi dalam perijinan usaha dan lain sebagainya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan perkembangan perindustrian.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dampak perkembangan industri sangat besar sekali terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Industri memegang peranan penting sebagai salah satu dalam menentukan perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan pemerintah seoptimal.

2. Upaya pemerintah untuk meningkatkan perindustrian di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dari segi regulasi yang dilakukan dengan memperbarui Undang-Undang Perindustrian yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, dan dari segi birokrasi yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempermudah pengurusan ijin usaha.

B. Saran

Dengan melihat pengaruh perindustrian terhadap perkembangan perekonomian, maka sudah selayaknya apabila pemerintah bersikap serius dan segera melakukan perubahan, baik terhadap regulasi maupun birokrasi yang terkait dengan perindustrian agar pendapatan ekonomi nasional ikut semakin meningkat seiring berkembangnya era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin Vidya. (2013). *Paper tentang Perekonomian Indonesia dalam Era Globalisasi*.

Anwar Luriohk. (2014). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Sosial Budaya*.

Bagus Cahyo Jaya Pratama. (2012). *Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia)*.

Capello, Roberta. (2007). *Regional Economics*, Routledge, New York.

Geographical Review. (2009). Vol 99, Issue:January, pp. 61-80.

Gibb, A.A. (1987). "Enterpriseculture – its meaning and implication for education and training", *Journal of European Industrial Training*, Vol 11, No. 2, pp. 1-38.

<http://www.voaindonesia.com/content/forum-ekonomi-dunia-kemiskinan-digital-perlambat-pertumbuhan-ekonomi/2722278.html>.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110602_wefquestionandanswer.shtml

<https://teori-politik.blogspot.com/2017/10/materi-kuliah-ekonomi-politik-dan.html>

<http://cisfed.org/ekonomi-politik-dalam-menanggapi-kasus-globalisasi-ekonomi-dan-politik/>

<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/03/22/pengaruh-globalisasi-ekonomi-dan-hukum-ekonomi-internasional-dalam-pembangunan-hukum-ekonomi-indonesia/>

<http://www.mendeley.com>, diakses 11 Juli 2012

<http://art-skets.blogspot.com>, diakses 16 Juli 2012

<http://www.marketingteacher.com>, diakses 10 Juli 2012

<http://repository.usu.ac.id>, diakses 10 Juli 2012

<http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/buletin/journal>, diakses 7 Juni 2012

Kerja Pemerintah Tahun 2016. *KERANGKA EKONOMI MAKRO*.

Operator Warnet Vast Raha. (2013). *Paper tentang Industrialisasi di Indonesia*.

Pasaribu Rowland B.F. (2010). tentang *Industri dan Industrialisasi*

Putri Kurniawan Darmawati. (2011). *Pengaruh Perindustrian bagi Perekonomian Indonesia*.

Siti Suariyah. (2014). *Globalisasi Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Global*. Rencana

Suhodo, Diah Setiari. (2010). *Industri Kreatif, Solusi Baru Ekonomi Indonesia*. *Seminar Nasional Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis II, Universitas Tarumanegara Jakarta*

Tavris, C. (1992). *The Mismeasure of Women*. Simon and Schuster: New York, NY.

Yunus Thariq. (2010). *Perkembangan Industri dan Pengaruh Terhadap Perekonomian Indonesia*.

Zaini, Afrizal Woyla Saputra. (2011). *Rendahnya Daya Saing Indonesia Terhadap Negara-Negara Maju*. *Paper*.